FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis (SS 1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Lintas Sektoral yang Efektif					
Indikator Kinerja (IK 1)	Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	87%	90%	92%	95%	100%
Indikator Kinerja (IK 1.1)	Persentase Capaian Target Meningkatnya Indeks Reformasi birokrasi yang didukung oleh Kemenko Polhukam					
Indikator Kinerja (IK 1.2)	Persentase Capaian Target Meningkatnya Keamanan Siber melalui Jaringan Aman Mandiri yang didukung oleh Kemenko Polhukam					
Indikator Kinerja (IK 2)	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur dalam Dokumen Perencanaan Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja (IK 3)	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang Ditindaklanjuti	50%	75%	80%	95%	100%

Sasaran Strategis (SS 2)	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal					
Indikator Kinerja (IK 2.1)	Nilai SAKIP	76	78	80	82	85
Indikator Kinerja (IK 2.2)	Nilai PMPRB	20	20	21	21	22
Indikator Kinerja (IK 2.3)	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4
Indikator Kinerja (IK 2.4)	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	82	85	87	90

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

RUS NURHADI SUTEDJO

FORMULIR MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Definisi Sasaran Strategis (SS 1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Lintas Sektoral yang Efektif adalah penyelenggaraan sinergitas kebijakan bidang komunikasi, informasi dan aparatur melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian lintas sektoral dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk penyelesaian *debottlenecking* kebijakan bidang komunikasi, informasi dan aparatur.
Definisi Indikator Kinerja (IK 1)	Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional.
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.1)	Persentase Capaian Target Meningkatnya Indeks Reformasi birokrasi yang didukung oleh Kemenko Polhukam. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur.
Sumber Data (IK 1.1)	Laporan Indeks RB oleh Kementerian PAN & RB
Cara Menghitung (IK 1.1)	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.2)	Persentase Capaian Target Meningkatnya Keamanan Siber melalui Jaringan Aman Mandiri yang didukung oleh Kemenko Polhukam Pertahanan, Keamanan, dan Stabilitas Politik adalah syarat mutlak berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi IT yang sangat pesat bukan hanya memberikan manfaat tapi juga sangat potensial menjadi ancaman bagi Hankamnas. Dalam Buku Putih Pertahanan (2015) komunikasi digital atau "ruang siber" telah menjadi domain kelima yang dapat dijadikan sebagai medan peperangan, selain darat, laut, udara dan ruang angkasa. Ketahanan siber nasional merupakan salah satu tugas utama Kemenko Polhukam yang sangat sulit untuk dilaksanakan karena tidak tersedianya sarana utama tugas yang berupa Jaringan Telekomunikasi Khusus (Jamtelsus) Pemerintah yang Mandiri, Aman dan Handal.

	Ditinjau dari segi infrastruktur, kemandirian telekomunikasi pemerintah tidak dapat terwujud karena jaringan yang digunakan bersatu dengan jaringan telekomunikasi publik/umum yang dimiliki oleh pihak asing. Keamanan data negara tidak terwujud karena rendahnya standard enkripsi/sandi data jaringan publik/umum.
Cara Menghitung (IK 1.2)	$\sum = \frac{\text{Capaian Target Meningkatnya Keamanan Siber}}{\text{Target Meningkatnya Keamanan siber pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$
Sumber Data (IK 1.2)	Laporan Pencapaian Keamanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara
Definisi Indikator Kinerja (IK 2)	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Dalam Dokumen Perencanaan Nasional adalah Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Kominfotur yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional.
Cara Menghitung	$\sum = \mu$ *persentase capaian target rekomendasi kebijakan bidang kominfotur sesuai dokumen perencanaan nasional*
Definisi Indikator Kinerja (IK 3)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang ditindaklanjuti adalah Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Kominfotur yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\sum = \mu$ *persentase capaian target rekomendasi kebijakan bidang kominfotur yang ditindaklanjuti*
Definisi SS 2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain dalam rangka pemenuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit organisasi, serta untuk mewujudkan tata kelola unit organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Definisi Indikator Kinerja (IK 2.1)	Nilai SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Internal; 5) Capaian Kinerja.
Sumber Data (IK 2.1)	Laporan Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung (IK 2.1)	Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%). Kategori Penilaian : 1) AA (>90-100); 2) A (>80-90); 3) BB (>70-80); 4) B (>60-70); 5) CC (>50-60); 6) C (>30-50); 7) D (0-30).
Definisi Indikator Kinerja (IK 2.2)	Nilai PMPRB Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam area perubahan, yaitu: 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penguatan Pengawasan; 6) Penatan Sistem Manajemen SDM; 7) Penguatan AKuntabilitas Kinerja; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sumber Data (IK 2.2)	Laporan Hasil PMPRB Kemenko Polhukam
Cara Menghitung (IK 2.2)	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada 8 (delapan) area perubahan. Skala nilai 0 – 23.
Definisi Indikator Kinerja (IK 2.3)	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasaan *stakeholders* terhadap hasil pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun pelayanan pada tata usaha dan umum Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur.
Sumber Data (IK 2.3)	Penilaian berdasarkan Lembar Kerja Elektronik
Cara Menghitung (IK 2.3)	$\sum = \frac{\textit{Indeks pada pelayanan program dan evaluasi} + \textit{Indeks pada Pelayanan tata usaha dan umum}}{2}$
Definisi Indikator Kinerja (IK 2.4)	Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai di masing-masing unit kerja untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu periode ke depan.
Sumber Data (IK 2.4)	Nilai yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja.
Cara Menghitung (IK 2.4)	Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: *50 poin untuk unsur perencanaan; *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

RUS NURHADI SUTEDJO